

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN EMISI KARBON
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2018)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Akuntansi (S1)**

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun Oleh:

Karina Desy Cahya Putri

NPM: 16 04 22867

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

Skripsi

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN EMISI KARBON**

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2018)

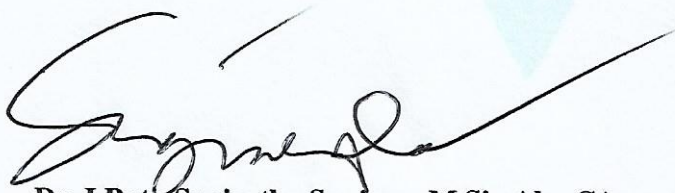
Disusun Oleh:

Karina Desy Cahya Putri

NPM: 16 04 22867

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. I Putu Sugiarta Sanjaya, M.Si., Ak., CA.

4 Februari 2020

Skripsi

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN EMISI KARBON**

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Karina Desy Cahya Putri

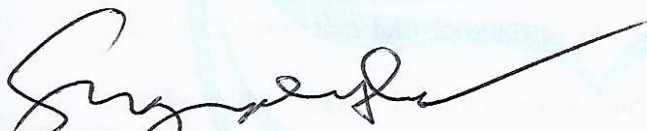
NPM: 16 04 22867

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 13 Maret 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai
gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Panitia Penguji

Anggota Panitia Penguji



Dr. I Putu Sugiarta Sanjaya, M.Si., Ak., CA.



Pratiwi Budiharta, SE., MSA., Akt.



Wimpie Yustino Setiawan, SE., M.Comm., MPA

Yogyakarta, 16 Maret 2020

**Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



BISNIS



Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2018)

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Februari 2020

Yang menyatakan,



Karina Desy Cahya Putri

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Strata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak telah terlibat dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, penyertaan, kasih karunia, dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Ko Theo, dan Thea atas dukungan, doa, dan semangat yang terus diberikan kepada penulis.
3. Dr. I Putu Sugiatha Sanjaya, M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberi pengarahan kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi dengan baik.
4. Para dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi.
5. Eduardo Tjandra atas dukungan, doa, semangat, dan motivasi yang terus diberikan kepada penulis.

6. Teman-teman dekat selama proses perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lala, Stevanie, dan Thalia.
7. Sahabat terbaik penulis, Yemi, Ria, Nadia, dan Excel yang selalu memberikan semangat, dukungan, penghiburan, dan doa kepada penulis.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 3 Februari 2020

Penulis,

Karina Desy Cahya Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

- Filipi 4:6 -

“If you can dream it, you can do it.”

- Walt Disney –

Untuk orang tua, saudara, dan sahabatku.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Motto dan Persembahan	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	9
2.1. Teori Legitimasi	9
2.2. Teori <i>Stakeholder</i>	10
2.3. Pengungkapan Emisi Karbon	12
2.3.1. Pengungkapan Sukarela	12
2.3.2. Pengertian Emisi Karbon	12
2.3.3. Pengungkapan Emisi Karbon.....	13
2.4. <i>Corporate Governance</i>	15
2.4.1. Dewan Direksi.....	17
2.4.2. Komisaris Independen.....	17
2.4.3. Komite Lingkungan	19
2.5. Hasil Penelitian Terdahulu	20
2.6. Pengembangan Hipotesis	22

2.6.1.	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	22
2.6.2.	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	23
2.6.3.	Pengaruh Komite Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	24
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1.	Jenis Penelitian	26
3.2.	Objek Penelitian	26
3.3.	Populasi dan Sampel	26
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	27
3.5.	Definisi Operasional Variabel	27
3.5.1.	Variabel Independen	28
3.5.2.	Variabel Dependen.....	29
3.5.3.	Variabel Kontrol.....	30
3.6.	Model Penelitian.....	31
3.7.	Teknik Analisis Data	32
3.7.1.	Statistik Deskriptif	32
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik.....	32
3.7.3.	Uji Hipotesis	35
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1.	Hasil Pemilihan Sampel	38
4.2.	Statistik Deskriptif.....	38
4.3.	Uji Asumsi Klasik	40
4.3.1.	Uji Normalitas	40
4.3.2.	Uji Multikolinearitas.....	41
4.3.3.	Uji Heteroskedastisitas	42
4.3.4.	Uji Autokorelasi.....	43
4.4.	Uji Hipotesis.....	45
4.4.1.	Koefisien Determinasi (R^2).....	45
4.4.2.	Uji Regresi Simultan (Uji F).....	46
4.4.3.	Uji Regresi Parsial (Uji t)	47
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	49

4.5.1.	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	49
4.5.2.	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	51
4.5.3.	Pengaruh Komite Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon...	52
4.5.4.	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon ...	53
4.5.5.	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	54
BAB V PENUTUP.....		55
5.1.	Kesimpulan.....	55
5.2.	Keterbatasan dan Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN.....		60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Indeks Pengungkapan Emisi Karbon.....	14
Tabel 3.1: Pengambilan Keputusan Uji <i>Durbin Watson (DW-Test)</i>	34
Tabel 4.1: Kriteria Sampel.....	38
Tabel 4.2: Statistik Deskripif.....	39
Tabel 4.3: Uji Normalitas.....	40
Tabel 4.4: Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4.5: Uji Heteroskedastisitas.....	43
Tabel 4.6: Uji Autokorelasi.....	44
Tabel 4.7: Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4.8: Koefisien Determinasi (R^2).....	46
Tabel 4.9: Uji F.....	47
Tabel 4.10: Uji t.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Model Penelitian 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan.....	60
Lampiran 2: Perhitungan Variabel Penelitian	62
Lampiran 3: Hasil Output SPSS.....	66



Abstrak

Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Tujuan dilakukannya pengungkapan emisi karbon adalah untuk menciptakan citra perusahaan yang baik. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pengungkapan emisi karbon. Hal ini berkaitan dengan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebanyak 40 sampel dengan 120 pengamatan terpilih dalam penelitian ini. Sampel terdiri dari perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 – 2018 yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, sedangkan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Lingkungan, Pengungkapan Emisi Karbon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim yang ekstrem menjadi masalah yang sedang marak diperbincangkan. Pada pertemuan *Conference of Parties* (COP) ke-25 di Madrid, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapi dengan situasi darurat iklim yang dapat dilihat dari tingginya suhu permukaan bumi, pemanasan global, dan terjadinya anomali cuaca (Nurjoni, 2020). Penyebab utama dari adanya situasi darurat iklim adalah emisi karbon. Laporan terbaru terkait emisi karbon dioksida mencatat bahwa tahun 2019 merupakan rekor tertinggi emisi karbon dioksida yaitu sebesar 37 miliar ton (CNN Indonesia, 2019).

Faktanya, Indonesia turut menyumbang peningkatan emisi karbon yang tinggi. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara penyumbang Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar keempat di dunia (Dunne, 2019). Menurut data *Brown to Green Report 2018*, terjadi peningkatan emisi karbon sebesar 18% sepanjang 2012 – 2017 di Indonesia. Peningkatan emisi karbon ini disebabkan karena meningkatnya emisi dari pembangkit listrik, sektor industri, dan transportasi.

Selain berdampak pada perubahan iklim yang ekstrem, emisi karbon juga dapat meningkatkan risiko konflik, banjir, kekeringan, kerusakan ekosistem, kelaparan, gangguan kesehatan, dan juga gangguan ekonomi. Jika terus dibiarkan, peningkatan emisi karbon dapat mengancam masa depan dunia. Hal ini

menyebabkan timbulnya tuntutan dari masyarakat dunia kepada organisasi dunia dan pemerintah agar mengambil strategi proaktif untuk mengatasi permasalahan emisi karbon. Beberapa negara telah melakukan kesepakatan mengenai perubahan iklim, termasuk negara Indonesia.

Pada tahun 1997, *The United Nations* (PBB) mengesahkan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional mengenai pemanasan global yang merupakan amandemen terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*The United Nations Framework Convention on Climate Change*). Tujuan utama dari Protokol Kyoto adalah untuk mengurangi dampak pemanasan global ke tingkat yang dapat diterima dengan menstabilkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Pada tahun 2004, Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Dalam Protokol Kyoto, negara maju (Annex I) diwajibkan untuk menurunkan emisi karbon. Sedangkan negara berkembang (Non-Annex I) yang meratifikasi Protokol Kyoto tidak diwajibkan menurunkan emisi karbon, namun dapat menurunkan emisi karbon secara sukarela dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia turut berupaya dalam menurunkan emisi karbon dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Upaya penurunan emisi karbon dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai

Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca. Pada pasal 4 disebutkan bahwa pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi salah satu peserta Konferensi Perubahan Iklim atau *Conference of Parties (COP) 21 UNFCCC* yang diadakan di Paris. Konferensi yang dihadiri oleh 195 negara tersebut menghasilkan Kesepakatan Paris. Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional berbasis hukum dengan tujuan menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celsius. Setiap negara perlu memasukkan komitmen terkait banyaknya emisi karbon dioksida yang akan dikurangi (ditjenppi.menlhk.go.id).

Pemerintah Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Indonesia memiliki komitmen penurunan emisi karbon yang tertuang dalam kebijakan Rencana Aksi Nasional GRK. Target penurunan emisi untuk seluruh sektor pada tahun 2020 adalah sebesar 26%. Sedangkan target penurunan emisi pada tahun 2020 – 2030 adalah sebesar 29% dari *business as usual* sampai dengan 41 % dengan bantuan internasional. Penurunan emisi di Indonesia berfokus pada 5 sektor yang berkontribusi paling banyak pada produksi emisi karbon yaitu sektor kehutanan sebesar 17%, energi 11%, pertanian 0,32%, industri 0,10%, dan limbah 0,38% (Nurjoni, 2020).

Adanya komitmen pemerintah terhadap penurunan emisi karbon memerlukan dukungan dari semua pihak, tak terkecuali industri. Industri sebagai salah satu penyumbang emisi karbon perlu bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasinya. Upaya pertanggungjawaban perusahaan terkait emisi karbon perlu diungkapkan melalui pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan guna menjawab tuntutan dari masyarakat.

Pengungkapan emisi karbon termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini diatur dalam PSAK No.1 paragraf 9 yang secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial mengenai masalah lingkungan dan sosial. Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Oleh karena itu, belum banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon di laporan tahunan atau laporan keberlanjutannya. Indonesia belum memiliki standar yang secara langsung mengatur mengenai pengungkapan emisi karbon. Peneliti menggunakan *Carbon Disclosure Index* (CDI) sebagai indeks untuk mengukur pengungkapan emisi karbon. CDI merupakan indeks pengukuran emisi karbon yang dikembangkan oleh Choi et al. (2013).

Pengungkapan emisi karbon dapat melegitimasi kegiatan perusahaan dan menciptakan citra perusahaan yang baik. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pengungkapan emisi karbon. Hal ini berkaitan dengan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur *corporate*

governance terhadap pengungkapan emisi karbon. Struktur *corporate governance* yang digunakan sebagai penelitian ini adalah dewan direksi, komisaris independen, dan komite lingkungan.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Manurung et al. (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi dan komite lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan Kilic dan Kuzey (2019) menyatakan bahwa komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Liao et al. (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Belum banyak penelitian yang meneliti mengenai pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 – 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrem disebabkan oleh peningkatan emisi karbon. Menurut data *Brown to Green Report 2018*, Indonesia mengalami peningkatan emisi karbon sebesar 18% sepanjang 2012-2017, yang disebabkan karena meningkatnya emisi dari pembangkitan listrik, sektor

industri, dan sektor transportasi. Adanya peningkatan emisi karbon ini berdampak pada tuntutan pertanggungjawaban emisi karbon dari masyarakat dan *stakeholders*. Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap emisi karbon dapat diungkapkan melalui pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah dewan direksi, komisaris independen, dan komite lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah komite lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan direksi, komisaris independen, dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepada khalayak umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kontribusi teori bagi dunia akademik sebagai pelengkap, referensi, dan sumbangan konseptual terhadap penelitian sejenis, yakni analisis pengungkapan emisi karbon.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, model penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pemilihan sampel, statistik deskriptif, hasil analisis data, dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi digunakan untuk memahami aksi dan aktivitas perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan. Teori legitimasi didasarkan pada kontrak sosial (Rankin, 2012). Suatu organisasi dapat terus ada karena masyarakat telah menyediakan sarana untuk organisasi melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dengan organisasi jika masyarakat merasa tidak puas dengan aktivitas operasi yang dilakukan organisasi.

Kontrak sosial dapat terjadi di antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan mengonsumsi sumber daya. Masyarakat memiliki harapan tentang bagaimana perusahaan harus bertindak agar masyarakat dapat bertahan di masa depan. Perusahaan atau bisnis sesungguhnya menerima perijinan untuk beroperasi dari sosial dan mereka harus secara akuntabel menginformasikan bagaimana perusahaan beroperasi (Rankin, 2012).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk beroperasi sesuai dengan norma yang dimiliki masyarakat. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas, bukan hanya kepada pemegang sahamnya saja. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan legitimasi dengan cara melakukan pengungkapan dalam laporan perusahaan. Menurut Lindblom dalam buku *Intellectual Capital* (2017), pengungkapan dapat

digunakan perusahaan untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan aktivitas sosial dan lingkungan.

2.2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan mencoba menyelaraskan kegiatannya dengan harapan pemangku kepentingan (Barako dan Brown, 2008). Menurut Rankin (2012), teori *stakeholder* merupakan turunan teori politik ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan teori legitimasi. Perbedaan utama antara teori legitimasi dan teori *stakeholder* adalah teori *stakeholder* mempertimbangkan hubungan yang ada antara organisasi dan berbagai macam pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sedangkan teori legitimasi berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Menurut Rankin (2012), teori *stakeholder* dibagi menjadi dua:

1. Normative Branch of Stakeholder Theory

Teori ini berkaitan dengan perlakuan etis atau moral dari *stakeholders* perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, dan perusahaan harus dikelola untuk kepentingan semua pemangku kepentingannya. *Normative Branch of Stakeholder Theory* berargumentasi bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan bagaimana operasi mereka mempengaruhi pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik perusahaan saja.

2. *Managerial Branch of Stakeholder Theory*

Managerial Branch of Stakeholder Theory adalah teori positif yang berupaya menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan dapat memengaruhi tindakan perusahaan. Teori ini berfokus pada hubungan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat dan bukan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini mempertimbangkan para pemangku kepentingan berdasarkan kekuatan atau pengaruhnya pada perusahaan. Perusahaan akan lebih mempertimbangkan pemangku kepentingan yang menguasai atau memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manajer memiliki peran penting dalam mempertimbangkan kepentingan relatif dari masing-masing pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan. Tingkat kekuatan atau pengaruh pemangku kepentingan masing-masing cenderung berubah seiring waktu dan dalam keadaan yang berbeda.

Salah satu cara penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan adalah memberikan informasi tentang kegiatan dan kinerja organisasi (Rankin, 2012). Informasi tentang kegiatan dan kinerja organisasi yang diungkapkan dapat menunjukkan bagaimana arah, misi, atau tujuan strategis selaras dengan harapan para pemangku kepentingan, atau bagaimana kinerja keuangan atau lingkungan organisasi memenuhi persyaratan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat menjadi salah satu cara yang untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan dari para pemangku kepentingan, atau untuk mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan yang kurang diinginkan (Rankin, 2012).

2.3. Pengungkapan Emisi Karbon

2.3.1. Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien (Rankin, 2012). Pada laporan tahunan perusahaan terdapat 2 jenis pengungkapan informasi, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pasar modal pada setiap negara memiliki peraturan mengenai informasi apa saja yang wajib diungkapkan oleh emitennya. Informasi yang wajib diungkapkan oleh emiten disebut dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Penyampaian informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib disebut dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Tidak ada peraturan mengenai pengungkapan sukarela, sehingga terdapat keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan. Pengungkapan sukarela sering kali dilakukan perusahaan karena adanya ketidakpuasan dengan pengungkapan wajib sehingga timbul tuntutan dari *stakeholders* untuk meningkatkan pelaporan perusahaan (Rankin, 2012).

2.3.2. Pengertian Emisi Karbon

Kementerian Lingkungan Hidup mendefinisikan emisi gas rumah kaca sebagai proses lepasnya gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang berada di atmosfer yang menimbulkan dampak pada suhu atmosfer bumi akibat dari panas radiasi. Hal ini menyebabkan adanya efek pemanasan yang disebut efek rumah kaca. Oleh

karena itu, terdapat beberapa jenis gas utama yang disepakati perjanjian internasional untuk dikurangi. Gas-gas tersebut terdiri dari karbon dioksida (CO₂), nitrus oksida (N₂O), dan metana (CH₄).

Karbon dioksida (CO₂) adalah GRK utama yang paling besar jumlahnya yang dihasilkan oleh kegiatan manusia (Lisasari, 2017). Aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil biasanya menghasilkan karbon dioksida. Aktivitas tersebut diantaranya adalah penggunaan listrik, kegiatan industri, transportasi, kegiatan pertanian dan perkebunan, dan masih banyak lagi. Aktivitas-aktivitas ini mengakibatkan kadar karbon dioksida menjadi lebih padat sehingga alam tidak dapat menyerap seluruh karbon dioksida yang tersedia.

2.3.3. Pengungkapan Emisi Karbon

Perusahaan diharapkan untuk tidak hanya mengungkapkan informasi keuangan saja namun juga informasi tambahan seperti kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Pengungkapan informasi terkait sosial dan lingkungan perusahaan dapat menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu penerapan dari pengungkapan lingkungan.

Pengukuran pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan emisi karbon yang diadopsi dari penelitian Choi et al. (2013). Dalam penelitiannya, Choi et al. (2013) mengembangkan *check list* berdasarkan lembar permintaan informasi yang diberikan oleh CDP (*Carbon Disclosure Project*). CDP merupakan organisasi nirlaba yang menjalankan sistem

pengungkapan global bagi investor, perusahaan, kota, dan negara untuk mengelola dampak lingkungan. Indeks pengungkapan emisi karbon yang diadopsi dari Choi et al. (2013) terdiri dari lima kategori terkait perubahan iklim dan emisi karbon dengan 18 item identifikasi. Berikut merupakan indeks pengungkapan emisi karbon yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Carbon Disclosure Index

Kategori	Item
Perubahan Iklim: Risiko dan Peluang (CC/ <i>Climate Change</i>)	CC-1: Penilaian/deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik khusus maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.
	CC-2: Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim
Emisi Gas Rumah Kaca (GHG/ <i>Green House Gas</i>)	GHG-1: Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (contoh: <i>protocol</i> GRK atau ISO).
	GHG-2: Keberadaan verifikasi eksternal kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa.
	GHG-3: Total emisi gas rumah kaca (metrik ton CO ₂ yang dihasilkan.)
	GHG-4: Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung.
	GHG-5: Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misalnya: batu bara, listrik, dll).
	GHG-6: Pengungkapan emisi GRK berdasarkan fasilitas atau level segmen.
	GHG-7: Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya

Konsumsi Energi (EC/ <i>Energy Consumption</i>)	EC-1: Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya tera-joule atau PETA-joule).
	EC-2: Kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat diperbaharui.
	EC-3: Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen.
Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya (RC/ <i>Reduction and Cost</i>)	RC-1: Detail /rincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK
	RC-2: Spesifikasi dari target tingkat/level dan tahun pengurangan emisi GRK.
	RC-3: Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (<i>costs or savings</i>) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi karbon.
	RC-4: Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (<i>capital expenditure planning</i>).
Akuntabilitas Emisi Karbon (AEC/ <i>Accountability of Carbon</i>)	AEC-1: Indikasi dimana dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tanggung jawab atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
	AEC-2: Deskripsi mekanisme dimana dewan (atau badan eksekutif lainnya) meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan iklim.

Sumber: Choi et al. (2013)

2.4. *Corporate Governance*

Menurut *Turnbull Report* pada buku *The Power of Good Corporate Governance* (2016), *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. *World Bank* mendefinisikan *corporate governance* pada buku *The Power of Good*

Corporate Governance (2016) sebagai kumpulan peraturan yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Oleh karena itu, *good corporate governance* penting untuk keberlanjutan perusahaan.

Terdapat lima prinsip dalam *corporate governance*. Prinsip pertama merupakan transparansi. Pada prinsip ini, perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan. Prinsip kedua merupakan akuntabilitas, yang dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkannya. Prinsip ketiga adalah reponsibilitas, maksud dari prinsip ini adalah perusahaan perlu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya terdapat prinsip independensi, maksudnya adalah perusahaan harus menjalankan tugasnya dengan baik dan mengambil keputusan dengan baik secara mandiri. Dalam prinsip kesetaraan, perusahaan harus mampu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham (Effendi, 2016).

Implementasi *good corporate governance* dapat dijalankan pada penyusunan struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan menurut Effendi (2016) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, dewan direksi, dan dewan komisaris. Setiap perusahaan memiliki struktur *corporate governance* yang berbeda-beda. Struktur *corporate governance* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah dewan direksi, komisaris independen, dan komite lingkungan.

2.4.1. Dewan Direksi

Definisi dewan direksi menurut pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengambilan keputusan atas kebijakan dan strategi perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek dilakukan oleh dewan direksi. Oleh karena itu, dewan direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan.

Pengelolaan sumber daya yang ada pada perusahaan merupakan tanggung jawab dewan direksi. Dewan direksi perlu membuat arah kebijakan perusahaan terkait sumber daya dan lingkungan yang digunakannya. Direksi suatu perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan dan pengambilan kebijakan perusahaan. Ukuran dewan direksi merupakan jumlah seluruh dewan direksi yang ada di perusahaan.

2.4.2. Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dilakukan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris sangat diperlukan perusahaan guna melaksanakan fungsi pengawasan.

Pada pelaksanaannya terdapat dua jenis dewan komisaris, yaitu dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Effendi, 2016). Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya, serta tidak mempunyai hubungan usaha berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Selain itu, komisaris independen tidak memiliki saham pada perusahaan terkait. Tugas dari komisaris independen adalah memastikan praktik dan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Adanya komisaris independen bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Effendi, 2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa dewan komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan. Terdapat pula peraturan pencatatan efek dari PT Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan jumlah komisaris independen secara

proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Proporsi dewan komisaris independen merupakan perbandingan jumlah komisaris independen dengan seluruh komisaris yang ada di perusahaan.

2.4.3. Komite Lingkungan

Michelon dan Parbonetti (2012) mengatakan bahwa perusahaan sering kali menunjuk komite khusus untuk mengatasi masalah lingkungan dari perspektif risiko, peluang strategis dan komitmen kepada para pemangku kepentingan. Ditunjuknya komite khusus untuk mengatasi masalah lingkungan bertujuan untuk melakukan perencanaan, implementasi, dan tujuan terkait kebijakan dan kegiatan keberlanjutan secara sistematis. Komite lingkungan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan risiko lingkungan. Hal ini mencakup risiko reputasi dan ancaman lingkungan terhadap legitimasi.

Adanya komite lingkungan pada perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang aspek lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peran komite lingkungan sehubungan dengan pengungkapan lingkungan adalah memastikan pengungkapan akuntansi lingkungan yang tepat. Komite lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, dan memperhitungkan emisi GRK secara kredibel dan karenanya cenderung melihat pentingnya pelaporan GRK (Michelon dan Parbonetti, 2012).

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kilic dan Kuzey (2019) menguji pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi dewan direksi independen, direksi asing, keragaman *gender*, dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan Turki yang terdaftar dalam Bursa Istanbul selama periode 2011 – 2015. Hasil dari penelitian Kilic dan Kuzey (2019) menunjukkan bahwa direksi asing dan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Ukuran dewan direksi, proporsi direksi independen, dan keragaman *gender* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan Manurung et al. (2017) memiliki empat variabel independen, yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi, keragaman *gender*, dan komite lingkungan, serta variabel dependennya yaitu pengungkapan emisi karbon. Objek penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan komisaris independen dan keragaman *gender* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhiroh dan Kiswanto (2016) meneliti pengaruh kinerja lingkungan, visibilitas organisasi, kondisi keuangan, dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Objek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visibilitas

organisasi, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara kinerja lingkungan, kesulitan keuangan, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kacaribu (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh dewan direksi dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang periode 2016 – 2018. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah dewan direksi dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan Liao et al. (2014) meneliti pengaruh keragaman *gender*, dewan independen, dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon dengan ukuran direksi sebagai variabel kontrol. Objek penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman *gender*, komite lingkungan, dan dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Aktivitas operasi perusahaan menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan masyarakat kepada perusahaan terkait pertanggungjawaban lingkungan. Teori legitimasi menyatakan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan mengonsumsi sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasinya. Upaya pertanggungjawaban perusahaan terkait emisi karbon dapat diungkapkan perusahaan melalui pengungkapan emisi karbon.

Corporate governance memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait diungkapkannya suatu informasi. Hal ini berkaitan dengan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Dewan direksi sebagai salah satu organ dari *corporate governance*, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan sehingga perlu memastikan bahwa dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan yang memiliki risiko material dipantau dengan baik dan diungkapkan sepenuhnya (Ben-Amar et al., 2017).

Dimasukkannya lebih banyak dewan direksi dapat meningkatkan kapasitas pemantauan dewan dan kemampuan untuk meningkatkan kegiatan penciptaan nilai. Dengan adanya peningkatan pemantauan, perusahaan akan lebih memperhatikan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dan melakukan strategi proaktif

untuk mengatasi dampak lingkungan terkait emisi karbon. Dewan direksi akan berusaha untuk melegitimasi kegiatan perusahaan terkait emisi karbon dengan memberikan informasi melalui pengungkapan emisi karbon sehingga dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar mungkin lebih kuat untuk menangani masalah emisi karbon dan melakukan pengungkapan emisi karbon (Kilic dan Kuzey, 2019).

Hasil penelitian terdahulu Liao et al. (2014) menemukan hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi pada perusahaan, maka semakin luas pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1 : Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

2.6.2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Aktivitas operasi perusahaan yang berdampak pada meningkatnya emisi karbon menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban dari *stakeholders*. Para pemangku kepentingan mengharapkan perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon dan melakukan pengungkapan emisi karbon (Liao et al., 2014). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan

laba untuk kepentingan pemilik perusahaan saja. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memenuhi tuntutan dari *stakeholders* adalah melaporkan informasi terkait emisi karbon pada laporan tahunan dan keberlanjutan.

Guna melakukan fungsi pengawasan manajemen dan perlindungan terhadap *stakeholders*, dewan komisaris independen akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Tuntutan dan harapan dari *stakeholders* dapat disampaikan oleh dewan komisaris independen melalui rapat yang dilakukan dewan komisaris bersama dewan direksi. Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dapat memonitor manajemen lebih efektif. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin banyak pihak yang dapat mendorong perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungan terkait emisi karbon dan melakukan pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha2: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.6.3. Pengaruh Komite Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Aktivitas operasi perusahaan menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan masyarakat kepada perusahaan terkait pertanggungjawaban lingkungan. Teori legitimasi menyatakan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan mengonsumsi sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang

diakibatkan oleh aktivitas operasinya. Adanya komite lingkungan merupakan motif legitimasi dan manajemen reputasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik pengukuran terkait lingkungan.

Komite lingkungan merupakan komite yang ditunjuk secara khusus oleh perusahaan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan pada isu lingkungan. Komite lingkungan sangat penting guna menjalankan pemantauan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan emisi karbon (Rankin et al., 2011). Adanya komite lingkungan pada suatu perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas.

Hasil penelitian terdahulu Kilic dan Kuzey (2019) menemukan hubungan positif antara komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya komite lingkungan berdampak pada semakin luasnya pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha3: Komite Lingkungan Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa:

1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Komite Lingkungan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan pada penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon masih terbatas. Hal ini berdampak pada sedikitnya jumlah perusahaan yang dapat diteliti. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel independen lainnya yang diduga dapat berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon, seperti komite audit, keberagaman *gender*, dan sistem manajemen lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiroh, T., & Kiswanto. (2016). The Determinant Of Carbon Emission Disclosures. *Accounting Analysis Journal*, 326-336.
- Amaliyah, I., & Solikhah, B. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate Governance terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol.2 No.2.
- Astuti, I. (2019). *Target Penurunan Emisi Dimulai 2020*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/274137-target-penurunan-emisi-dimulai-2020> pada tanggal 24 Desember 2019.
- Barako, D.G., dan Brown, A.M. (2008). Corporate Social Reporting and Board Representation: Evidence from The Kenyan Banking Sector. *Journal of Management and Governance*, Vol. 12 No. 4, pp. 309-324.
- Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2017). Board Gender Diversity and Corporate Response to Sustainability. *Journal of Business Ethics*, Vol. 142 No. 2, pp. 369-383.
- Choi, B.B., Lee, D., & Psaros J. (2013). An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosures. *Pacific Accounting Review*, Vol. 25 Issue: 1, pp.58-79.
- CNN. (2019). *Emisi Karbon Dioksida Global Capai Rekor Tertinggi Tahun 2019*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191205191747->

199-454565/emisi-karbon-dioksida-global-capai-rekor-tertinggi-tahun-2019 pada 24 Desember 2019.

Dunne, D. (2019). *Profil Carbon Brief: Indonesia*. Diakses dari <https://www.carbonbrief.org/profil-carbon-brief-Indonesia> pada 20 Desember 2019.

Effendy, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.

Enerdata. (2018). Brown to Green Report 2018: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon. Diakses dari <http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2018> pada 15 Mei 2019.

Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Univeritas Diponegoro.

Ghozali, I., & Majid, R.A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.4 No.2.

Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Australia: John Willey & Sons Australia, Ltd.

Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta: BPF UGM.

- Kacaribu, H. E. (2019). Pengaruh Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial. *Skripsi. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- Kehutanan, K. L. (2015). *Kesepakatan COP21 / Paris*. Diakses dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/program/liputan-khusus-cop-21-2015/kesepakatan-cop21-paris.html> pada 17 April 2019.
- Kilic, M., & Kuzey, C. (2019). The Effect of Corporate Governance on Carbon Emission Disclosures: Evidence. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, Vol.11 Issue: 1, pp.35-53.
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2014). Gender Diversity, Board Independence, Environmental Committee and Greenhouse Gas Disclosure. *Forthcoming: British Accounting Review*.
- Madura, J. (2007). *Pengantar Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manurung, D., Kusumah, R., & Asikin, B. (2017). *Peran Corporate Governance dan Komite Lingkungan dalam Green House Gas Disclosure*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure. *Journal of Management and Governance*, 16(3), pp. 477-509.
- Nurjoni. (2020). *Dampak Emisi Karbon dan Darurat Iklim Ekstrem*. Diakses dari <https://investor.id/national/dampak-emisi-karbon-dan-darurat-iklim-ekstrem> pada 24 Januari 2020.

- Rankin, M. (2011). An Investigation of Voluntary Corporate Greenhouse Gas Emissions Reporting in a Market Governance System: Australian Evidence. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 24 Issue: 8, pp.1037-1070.
- Rankin, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta.
- Ulum, I. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yunus, S., Elijido, E., & Abhayawansa, S. (2016). Determinants of Carbon Management Strategy Adoption. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 31 Issue: 2, pp.156-179.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
3	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
4	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
5	ASGR	Astra Graphia Tbk.
6	ASII	Astra International Tbk.
7	BBNI	Bank Negara Indonesia
8	BBRI	Bank BRI
9	BBTN	Bank Tabungan Negara
10	BJBR	Bank Pembangunan Jawa Barat
11	BMRI	Bank Mandiri
12	BNLI	Bank Permata
13	BUMI	Bumi Resources Tbk.
14	CTBN	Citra Tubindo Tbk.
15	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
16	GMFI	Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
17	INAF	Indofarma (Persero) Tbk.
18	INCO	Vale Indonesia Tbk
19	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tb
20	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
21	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.
22	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk.
23	MBSS	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
24	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
25	MEDC	Medco Energi Internasional
26	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
27	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.
28	PEHA	Paphors Tbk
29	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
30	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
31	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
32	SMAR	Smart Tbk.
33	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.
34	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
35	TINS	Timah (Persero) Tbk.
36	TOTL	Total Bangun Persada Tbk.
37	UNTR	United Tractors Tbk.
38	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
39	WIKA	Wijaya Karya Tbk.
40	WTON	Wijata Karya Beton



Lampiran 2: Perhitungan Variabel Penelitian

Kode Perusahaan	Tahun	Dewan Direksi	Komisaris Independen	Komite Lingkungan	Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i>	CED
AALI	2016	6	0.4000	1	30.8185	0.2738	0.39
AMFG	2016	11	0.3333	0	29.3367	0.3462	0.06
ANJT	2016	6	0.5556	1	29.0600	0.5518	0.67
ANTM	2016	6	0.3333	1	31.0316	0.3860	0.83
ASGR	2016	4	0.5000	0	28.1754	0.3233	0.11
ASII	2016	11	0.3333	1	33.1988	0.4963	0.56
BBNI	2016	10	0.6250	1	34.0330	0.8170	0.28
BBRI	2016	11	0.5556	1	34.5424	0.8542	0.33
BBTN	2016	8	0.4286	1	32.9978	0.8537	0.33
BJBR	2016	7	0.8000	1	32.2591	0.8505	0.67
BMRI	2016	10	0.5000	1	34.5768	0.7938	0.33
BNLI	2016	10	0.5000	1	32.7402	0.8835	0.56
BUMI	2016	7	0.3750	1	31.3668	1.8977	0.33
CTBN	2016	5	0.3333	0	28.4051	0.2617	0.61
GIAA	2016	8	0.3333	1	31.2520	0.7298	0.56
GMFI	2016	5	0.3333	0	29.4142	0.6101	0.50
INAF	2016	3	0.3333	0	27.9543	0.5833	0.28
INCO	2016	4	0.3000	0	31.0125	0.1332	0.67
INTP	2016	10	0.4286	1	31.0372	0.1331	0.89
ITMG	2016	6	0.3333	1	30.4194	0.2499	0.83
JSMR	2016	6	0.3333	0	31.6107	0.6946	0.78
KAEF	2016	5	0.4000	1	29.1598	0.5076	0.28
MBSS	2016	4	0.4000	0	28.8842	0.2434	0.28
MDKA	2016	8	0.5000	0	29.0446	0.4774	0.39
MEDC	2016	5	0.4000	1	31.5148	0.7524	0.33
MLBI	2016	4	0.5714	1	28.4530	0.6393	0.56
NISP	2016	10	0.3750	1	32.5597	0.8588	0.33
PEHA	2016	4	0.3333	1	27.5069	0.2957	0.67
PGAS	2016	6	0.3333	1	32.1509	0.5361	0.67
PTBA	2016	6	0.3333	1	30.5529	0.4320	0.56
SGRO	2016	6	0.3333	0	29.7507	0.5487	0.33
SMAR	2016	6	0.5714	1	30.8945	0.6091	0.78
SMCB	2016	9	0.5000	1	30.6148	0.5921	0.89
SMGR	2016	7	0.2857	1	31.4204	0.3087	0.89

Kode Perusahaan	Tahun	Dewan Direksi	Komisaris Independen	Komite Lingkungan	Ukuran Perusahaan	Leverage	CED
TINS	2016	4	0.5000	0	29.8874	0.4079	0.33
TOTL	2016	9	0.3333	0	28.7130	0.6805	0.33
UNTR	2016	7	0.3333	1	31.7898	0.3339	0.56
UNVR	2016	10	0.8000	1	30.4492	0.7191	0.44
WIKA	2016	6	0.3333	1	31.0764	0.5938	0.33
WTON	2016	7	0.2500	1	29.1705	0.4658	0.28
AALI	2017	7	0.4000	1	30.8473	0.2569	0.39
AMFG	2017	11	0.3333	0	29.4664	0.4338	0.06
ANJT	2017	7	0.5000	1	29.6665	0.3074	0.67
ANTM	2017	6	0.3333	1	31.0327	0.3839	0.89
ASGR	2017	4	0.5000	0	28.5114	0.4522	0.11
ASII	2017	9	0.4615	1	33.3202	0.4713	0.61
BBNI	2017	10	0.5000	1	34.1953	0.8234	0.28
BBRI	2017	11	0.5556	1	34.6587	0.8510	0.33
BBTN	2017	8	0.6250	1	33.1969	0.8568	0.33
BJBR	2017	6	0.8000	1	32.3758	0.8595	0.67
BMRI	2017	10	0.5455	1	34.6563	0.7896	0.33
BNLI	2017	9	0.5000	1	32.6304	0.8550	0.56
BUMI	2017	7	0.4286	1	31.5421	0.9225	0.28
CTBN	2017	5	0.2500	0	28.3339	0.2954	0.61
GIAA	2017	7	0.3333	1	31.2589	0.7509	0.56
GMFI	2017	4	0.3333	1	29.6197	0.4328	0.56
INAF	2017	3	0.3333	0	28.0562	0.6559	0.28
INCO	2017	4	0.3000	0	31.0233	0.1672	0.67
INTP	2017	9	0.4286	1	30.9936	0.1492	0.89
ITMG	2017	8	0.2857	1	30.5355	0.2948	0.83
JSMR	2017	6	0.3333	0	32.0029	0.7682	0.78
KAEF	2017	5	0.4000	1	29.4387	0.5780	0.28
MBSS	2017	3	0.4000	1	28.8107	0.2175	0.33
MDKA	2017	8	0.4000	1	29.2428	0.4890	0.39
MEDC	2017	5	0.4000	1	31.8758	0.7282	0.33
MLBI	2017	4	0.5000	1	28.5513	0.5757	0.56
NISP	2017	10	0.6250	1	32.6665	0.8583	0.33
PEHA	2017	4	0.3333	1	27.7931	0.4035	0.67
PGAS	2017	5	0.3333	1	32.3393	0.4733	0.67
PTBA	2017	9	0.3750	1	30.7215	0.3724	0.56
SGRO	2017	5	0.3333	1	29.7550	0.5117	0.56

Kode Perusahaan	Tahun	Dewan Direksi	Komisaris Independen	Komite Lingkungan	Ukuran Perusahaan	Leverage	CED
SMAR	2017	6	0.5000	1	30.9314	0.5834	0.72
SMCB	2017	7	0.4286	1	30.6079	0.6333	0.89
SMGR	2017	7	0.2857	1	31.5242	0.3877	0.89
TINS	2017	5	0.4000	0	30.1056	0.4896	0.61
TOTL	2017	9	0.3333	0	28.8075	0.6885	0.33
UNTR	2017	7	0.3333	1	32.0409	0.2731	0.56
UNVR	2017	10	0.8000	1	30.5705	0.7264	0.44
WIKA	2017	6	0.3333	1	31.4528	0.6797	0.33
WTON	2017	7	0.2500	1	29.5866	0.6112	0.28
AALI	2018	7	0.5000	1	30.9215	0.2749	0.44
AMFG	2018	11	0.3333	0	29.7631	0.5735	0.11
ANJT	2018	5	0.5000	1	29.7975	0.3584	0.67
ANTM	2018	6	0.3333	1	31.1368	0.4073	0.89
ASGR	2018	4	0.3333	1	28.4514	0.3465	0.11
ASII	2018	10	0.3000	1	33.4737	0.4942	0.61
BBNI	2018	11	0.5556	1	34.3263	0.8302	0.33
BBRI	2018	12	0.7000	1	34.7988	0.8571	0.44
BBTN	2018	9	0.5556	1	33.3560	0.8608	0.33
BJBR	2018	4	0.5000	1	32.4201	0.8656	0.67
BMRI	2018	10	0.5000	1	34.7230	0.7835	0.44
BNLI	2018	8	0.5000	1	32.6608	0.8532	0.56
BUMI	2018	7	0.3750	1	31.6674	0.8711	0.50
CTBN	2018	6	0.3333	0	28.4445	0.3657	0.61
GIAA	2018	8	0.4286	1	31.7784	0.8147	0.56
GMFI	2018	5	0.3333	1	30.0012	0.5567	0.61
INAF	2018	3	0.3333	0	27.9973	0.6557	0.28
INCO	2018	4	0.3333	0	31.0880	0.1447	0.67
INTP	2018	9	0.3333	1	30.9556	0.0173	0.89
ITMG	2018	8	0.4000	1	30.6038	0.3278	0.83
JSMR	2018	6	0.3333	0	32.0428	0.7549	0.39
KAEF	2018	5	0.4000	1	29.8781	0.6452	0.28
MBSS	2018	3	0.4000	1	28.8749	0.2850	0.33
MDKA	2018	8	0.3333	0	30.0788	0.4709	0.39
MEDC	2018	5	0.4000	1	31.9634	0.7359	0.50
MLBI	2018	4	0.5000	0	28.6921	0.5959	0.28
NISP	2018	9	0.5000	1	32.7877	0.8593	0.33
PEHA	2018	5	0.5000	1	28.2669	0.5143	0.67

Kode Perusahaan	Tahun	Dewan Direksi	Komisaris Independen	Komite Lingkungan	Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i>	CED
PGAS	2018	5	0.4000	1	32.3757	0.5967	0.67
PTBA	2018	6	0.3333	1	30.8163	0.3269	0.61
SGRO	2018	5	0.3333	1	29.8303	0.5533	0.50
SMAR	2018	7	0.4286	1	31.0090	0.5821	0.72
SMCB	2018	8	0.4286	1	30.5578	0.6563	0.89
SMGR	2018	7	0.2857	1	31.5659	0.3601	0.89
TINS	2018	5	0.4000	1	30.3469	0.5686	0.61
TOTL	2018	7	0.3333	0	28.8031	0.6741	0.44
UNTR	2018	7	0.3333	1	32.3870	0.1873	0.61
UNVR	2018	10	0.8333	1	30.6026	0.6118	0.56
WIKA	2018	7	0.3333	1	31.7124	0.7093	0.33
WTON	2018	7	0.3333	1	29.8150	0.6468	0.39

Lampiran 3: Hasil Output SPSS

1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan Emisi Karbon Dewan Direksi	120	.06	.89	.5093	.21309
Komisaris Independen	120	3.00	12.00	6.8583	2.26146
Komite Lingkungan	120	.25	.83	.4194	.12244
Ukuran Perusahaan	120	.00	1.00	.7667	.42473
Leverage	120	27.51	34.80	30.8696	1.76882
Valid N (listwise)	120	.02	1.90	.5615	.25013

2. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18590503
	Absolute Differences	
Most Extreme Differences	Positive	.062
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.675
Asymp. Sig. (2-tailed)		.752

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.389	.206		1.890	.061		
Dewan Direksi	.002	.005	.035	.295	.769	.614	1.628
Komisaris Independen	-.026	.088	-.031	-.298	.767	.780	1.282
Komite Lingkungan	.018	.025	.076	.727	.469	.789	1.268
Ukuran Perusahaan	-.008	.008	-.132	-1.004	.317	.497	2.010
Leverage	-.022	.044	-.054	-.508	.612	.750	1.333

a. Dependent Variable: ABS_RES

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.389	.206		1.890	.061
Dewan Direksi	.002	.005	.035	.295	.769
Komisaris Independen	-.026	.088	-.031	-.298	.767
Komite Lingkungan	.018	.025	.076	.727	.469
Ukuran Perusahaan	-.008	.008	-.132	-1.004	.317
Leverage	-.022	.044	-.054	-.508	.612

a. Dependent Variable: ABS_RES

d. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.651 ^a	.424	.419	.14169341	1.984

a. Predictors: (Constant), LAG_RES

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.489 ^a	.239	.206	.18994

a. Predictors: (Constant), Leverage, Komite Lingkungan, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

b. Uji Regresi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.291	5	.258	7.156	.000 ^b
	Residual	4.113	114	.036		
	Total	5.404	119			

a. Dependent Variable: Pengungkapan Emisi Karbon

b. Predictors: (Constant), Leverage, Komite Lingkungan, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

c. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.143	.378		-.378	.706
Dewan Direksi	-.014	.010	-.151	-1.453	.149
Komisaris	-.064	.161	-.036	-.394	.694
Independen					
Komite Lingkungan	.147	.046	.292	3.176	.002
Ukuran Perusahaan	.028	.014	.230	1.985	.050
Leverage	-.340	.080	-.399	-4.232	.000

a. Dependent Variable: Pengungkapan Emisi Karbon

